



RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS PPKBPPPA
KABUPATEN SRAGEN



**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2025**

*

*

*

*

*



*

*

*

*

*

**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Ade Irma Suryani Nasution No. 1 Sragen Telepon : (0271) 8825838 Fax : 8825838 Sragen.
Website : dppkbpppa.sragenkab.go.id Email : ppkbpppa.sragen@gmail.com



KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen 2021-2026 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan selama periode 2022-2026 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen.

Rancangan Awal Renja Dinas PPKBPPPA ini disusun dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas PPKBPPPA Tahun 2021-2026 dengan sistematika penyusunan berpedoman kepada Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025.

Demikian Rancangan Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini disusun, diharapkan sebagai acuan dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam penetapan KUA-PPAS dan RKA Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2025 serta dapat memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh pegawai di Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sebagai tolak ukur dalam pengendalian dan evaluasi kinerja dan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen selama tahun pelaksanaan anggaran 2025.

Sragen, 07 Agustus 2024

KEPALA DINAS PPKBPPPA
KABUPATEN SRAGEN



dr. YOHANES AGUS SUDARMANTO, M.Kes.

NIP. 19700314 200501 1 009



DAFTAR ISI

JUDULi

KATA PENGHANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum.....8

 1.3. Maksud dan Tujuan 10

 1.4. Sistematika Penulisan 11

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 12

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 12

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....28

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 29

 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....29

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat61

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 62

 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 62

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 65

 3.3. Program dan Kegiatan 67

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 90

BAB V PENUTUP 120



DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rentsra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 18

Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen 28

Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2025 Kabupaten Sragen..... 30

Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 61

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiran Maju Tahun 2025 72

Tabel 4. Rencana Kerja dan Pendanaan Anggaran..... 97



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), salah satu upaya adalah dengan cara mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), atau memfokuskan pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam 1 (satu) tahun mendatang agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, setiap Perangkat Daerah harus berperan aktif, termasuk dalam hal menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsinya. Dalam memenuhi pencapaian kinerja yang baik, maka sangat diperlukan suatu dokumen perencanaan yang tersusun dengan baik yang kinerjanya dapat diukur dengan jelas dan tepat. Salah satu dokumen perencanaan adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah, dengan tahapan didalamnya termasuk penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan ber sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional dan bahwa agar dapat disusun perencanaan pembangunan Nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan Nasional, yang didalamnya termasuk Renja Perangkat Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Bab II Pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat (4) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



Renja Perangkat Daerah secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun (BAB I Pasal 1 ayat 30). Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (Bab II Bagian Kedua Pasal 13 ayat 2).

2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Renja Tahun 2025 selanjutnya merupakan pedoman umum dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Bab II Bagian Ketujuh Pasal 125 sampai dengan Pasal 143, dengan tata cara penyusunan dokumen Renja Tahun 2025 meliputi :

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Desember;
 - b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi



- hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
- c. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah;
 - d. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah;
 - e. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
 - f. Hasil perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika;
 - g. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah;
 - h. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD;
 - i. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
3. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, meliputi:
- a. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - b. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah;
 - c. Rancangan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sesuai dengan Hasil perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf f;



- d. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret;
 - e. Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala BAPPEDA kabupaten/kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD menjadi rancangan RKPD;
 - f. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret;
 - g. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - h. Verifikasi harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan Rancangan Awal RKPD;
 - i. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah;
 - j. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - k. Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan Kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA;
 - l. Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, meliputi:
- a. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA;
 - b. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - d. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima;



- e. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD;
 - b. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD;
 - c. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sesuai dengan Hasil perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf f.
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi;
 - b. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
 - c. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya;
 - d. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah;
 - e. Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
 - f. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA;
 - g. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;



- h. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- i. Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
- j. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2022, dan hasil evaluasi proyeksi Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2025. Rancangan Awal Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Awal Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen dengan Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

Rancangan Awal Renja Dinas PPKBPPPA mencermati pada Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, untuk Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen memiliki 8 (Delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) terdiri atas (1) Indeks Pembangunan Gender (IPG), (2) Angka Harapan Hidup Perempuan, (3) Rata-rata lama Sekolah Perempuan, (4) Pengeluaran perkapita Perempuan, (6) Predikat Kabupaten Layak Anak, (7) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), (8) Total Fertility Rate (TFR), selain terdapat Indikator Kinerja Penunjang yakni Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan perencanaannya harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mengaktualisasikan sinergitas dengan instrument-instrument perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu kegiatan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sragen harus memiliki prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh Dinas PPKBPPPA dengan mengedepankan pada prioritas-prioritas, sasaran yang mendukung pada Misi Pertama “**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia**” yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dengan sasaran ke 1.2 “**Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan keluarga**” dan sasaran 1.3 “**Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan anak**”.

Dalam proses perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025, dilakukan secara bertahap sekaligus memperhatikan



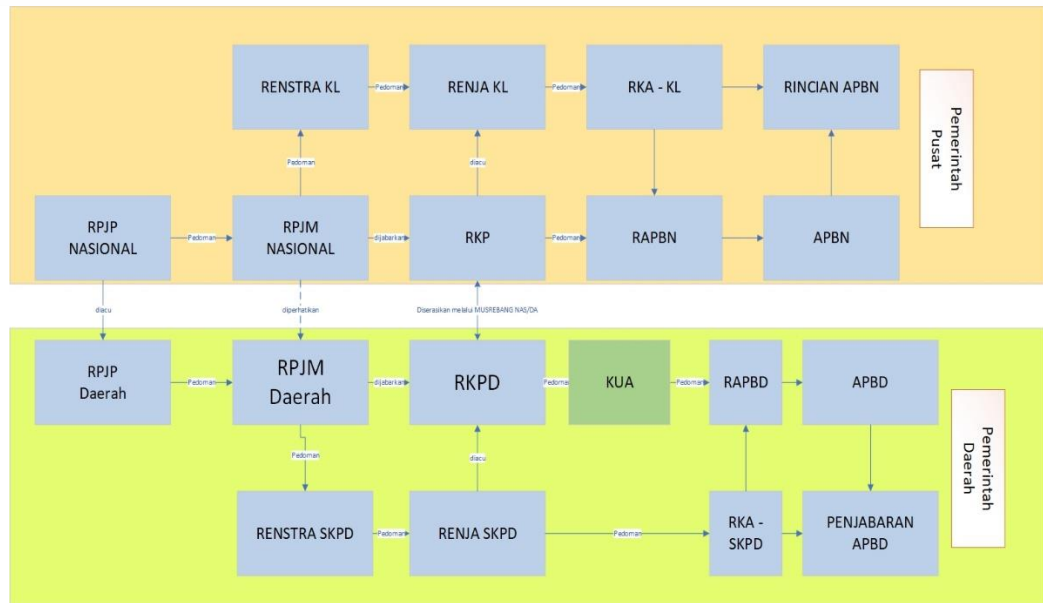
dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD tahun 2021-2026, dan Evaluasi RKPD tahun 2022, serta termuat kebijakan nasional yang dimasukkan dalam RKP maupun RPJMN Tahun 2020-2024. Hubungan antara dokumen Renja Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan saling keterkaitan karena didalam Renja Tahun 2025 membutuhkan seperti Visi, dan Misi Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun 2021-2026, isu-isu permasalahan yang dihadapi, serta program, kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan. Dan hal ini hanya bisa didapat di dokumen perencanaan seperti RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, Renstra tahun 2021-2026 dan lain-lainnya.

3. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Tindak Lanjutnya dengan Proses Penyusunan RAPBD

Rancangan Awal Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun berpedoman pada Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dan penetapan Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang merupakan dasar pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2025 sesuai dengan landasan-landasan hukum yang terkait.

Keterkaitan antara Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen dengan RKPD Kabupaten Sragen, Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen, Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Provinsi, serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD digambarkan sebagai berikut:

Alur Perencanaan dan Penganggaran



Gambar 1. Alur Perencanaan dan Penganggaran

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) PERPRES Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 12) INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana;
- 17) Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19) Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penerima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020;
- 20) Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2023 tentang Penerima Penghargaan Parahita Ekapraya Tahun 2023;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten



- Sragen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
 - 25) Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 71);
 - 26) Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 85);
 - 27) Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
 - 28) Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 54);
 - 29) Surat Edaran Bupati Sragen Nomor 050/1809/23/2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dengan penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Rancangan Awal Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan dasar perencanaan yang dilanjutkan hingga tahapan penetapan Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang yang merupakan dasar pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2025 sesuai dengan kegiatan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2025 sesuai dengan landasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait, serta untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor 1) pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 5 (lima) tahun kedepan.



b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah :

1. Digunakan sebagai instrument dan pedoman dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen.
2. Digunakan dalam menjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam program dan kegiatan bidang, yakni 1) pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan Organisasi Pemerintah Daerah.
3. Digunakan dalam mengusulkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas PPKB PPPA Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen tahun sebelumnya yang disandingkan dengan pencapaian Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen tahun sebelumnya yang disandingkan dengan pencapaian Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan 2024, serta disajikan perkiraan pencapaian target Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2023.

Pada tahun 2023, Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen melaksanakan 7 (tujuh) program, 18 (delapan belas) kegiatan, dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebagaimana tertuang di dalam APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp 16.306.350.572 (Enam belas milyar tiga ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp 6.228.498.572 (Enam milyar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan sumber dana dari DAK Non Fisik BOKB sejumlah Rp 10.077.852.000 (Sepuluh milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Dari total pagu indikatif tersebut, realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2023



sejumlah Rp 14.943.204.567 (Empat belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan capaian realisasi anggaran 91,64%. Rincian realisasi anggaran berdasarkan sumber pendanaan pagu indikatif Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2023 sebagai berikut:

1. APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023
 - Pagu indikatif : Rp 6.228.498.572
 - Realisasi anggaran : Rp 5.253.665.027
 - Capaian realisasi anggaran : 84,35%
2. DAK Non Fisik BOKB Tahun Anggaran 2023
 - Pagu indikatif : Rp 10.077.852.000
 - Realisasi anggaran : Rp 9.689.539.540
 - Capaian realisasi anggaran : 96,15%

2.1.1. Realisasi Program yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Dari keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2023, terdapat 2 (dua) program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan indikator
 - Persentase cakupan pendampingan forum anak
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dengan indikator
 - Angka kesertaan KB MKJP

2.1.2. Realisasi Program yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Dari keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2023, terdapat 5 (lima) program, yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Pengendalian Penduduk
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.1.3. Realisasi Program yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Dari keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen



Tahun 2023, terdapat 3 (tiga) program, yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan indikator
 - % ARG pada belanja langsung APBD capaian sebesar 730,20%;
 - Cakupan korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapat pelayanan pengaduan (angka) capaian sebesar 166,67%;
2. Program Perlindungan Perempuan, dengan indikator Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan pengaduan (angka) capaian sebesar 142,86%;
3. Program Pengendalian Penduduk, dengan indikator Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) capaian sebesar 109,18%.

2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhi atau Melebihi Target Kinerja Program

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, yang direncanakan oleh Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2023 antara lain:

a. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Sasaran Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) adalah meningkatnya program pemenuhan hak anak (PHA) dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- 1) Peningkatan kapasitas lembaga dalam partisipasi pemenuhan hak dan perlindungan anak
Dari target kinerja yang ditetapkan 60%, tercapai 60% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- 2) Persentase cakupan pendampingan forum anak
Dari target kinerja yang ditetapkan 40%, tercapai 30% dengan tingkat capaian kinerja 75%

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) antara lain:

- 1) Kurangnya SDM dalam kegiatan pendampingan forum anak sehingga sangat tidak sebanding dengan wilayah Kabupaten Sragen yang luas;
- 2) Belum semua stakeholder terkait baik dalam desa maupun kabupaten memprioritaskan dalam pemenuhan dan perlindungan anak.

b. Program Perlindungan Perempuan

Sasaran Program Perlindungan Perempuan adalah meningkatnya program perlindungan perempuan dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- 1) Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan pengaduan (angka)



Dari target kinerja yang ditetapkan 60%, tercapai 100% dengan tingkat capaian kinerja 166,67%

2) Rasio KDRT Perempuan

Dari target kinerja yang ditetapkan 0,31% tercapai 0,0014% dengan tingkat capaian kinerja 22.142,9%

Faktor penyebab melebihinya target kinerja Program Perlindungan Perempuan antara lain:

- 1) Semua kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan semua sudah terlayani pengaduannya;
- 2) Adanya peran serta P2TP2A, P4A baik kecamatan maupun desa dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga kasus dapat tertangani dengan baik.

c. Program Pengendalian Penduduk

Sasaran Program Pengendalian Penduduk adalah meningkatnya program pengendalian penduduk dengan indikator kinerja yaitu:

1) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)

Dari target kinerja yang ditetapkan 64,76%, tercapai 69,68% dengan tingkat capaian kinerja 107,60%

Faktor penyebab melebihinya target kinerja Program Pengendalian Penduduk antara lain:

- 1) Meningkatnya jumlah akseptor/peserta KB baik dari segi banyaknya peserta KB baru maupun masih bertahannya peserta kb aktif;
- 2) Terdapat peran PKB dan PLKB dalam meningkatkan penyuluhan terkait penggunaan KB serta mampu memenuhi serta merekap data jumlah peserta KB modern sehingga terciptanya sistem yang sinergis dan mampu memenuhi target.

d. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Sasaran Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) adalah meningkatnya program pembinaan keluarga berencana (KB) dengan indikator kinerja yaitu:

1) Angka kesertaan KB MKJP

Dari target kinerja yang ditetapkan 26,7%, tercapai 26,86% dengan tingkat capaian kinerja 100,60%

Faktor penyebab melebihinya target kinerja Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) antara lain:

- 1) Meningkatnya jumlah akseptor/peserta KB baik dari segi banyaknya peserta KB baru maupun masih bertahannya peserta kb aktif;
- 2) Terdapat peran PKB dan PLKB dalam meningkatkan penyuluhan di semua desa terkait penggunaan KB;



- 3) Meningkatnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik media cetak, elektronik maupun media lainnya terkait pelayanan KB kepada masyarakat;
 - 4) Meningkatnya peran serta Kampung KB dalam meningkatkan kinerja di tingkat kampung atau yang setaranya.
2. Faktor-faktor pendorong terpenuhinya target kinerja, program, kegiatan, dan sub kegiatan
- Faktor pendorong terpenuhinya target kinerja yang direncanakan oleh Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen pada tahun 2023, sebagaimana diuraikan, antara lain:
- a. Adanya regulasi yang mendukung PERPRES, INPRES, PERBAN, PERDA, dan PERBUP;
 - b. Berdasarkan data SIMFONI Jumlah korban kekerasan tahun 2023, untuk Korban kategori Anak total sebanyak 25 Orang dengan Laki-laki sebanyak 3 Orang, Perempuan sebanyak 22 Orang, untuk Korban kategori Dewasa total sebanyak 21 Orang, dengan Laki-laki sebanyak 0 Orang dan Perempuan sebanyak 21 Orang;
 - c. Berdasarkan jenis kasus terdapat total sebanyak 46 Kasus, terdiri atas Kasus KDRT sebanyak 18 Kasus, Kasus Pemerkosaan sebanyak 12 Kasus, Persetubuhan sebanyak 7 Kasus, Penelantaran sebanyak 3 Kasus, Bullying sebanyak 2 Kasus, Pelecehan sebanyak 3 Kasus, Penyebaran Foto Asusila sebanyak 1 Kasus;
 - d. Persentase ARG pada belanja langsung APBD tahun 2023 sebesar 36,51%;
 - e. Tahun 2023 Jumlah perempuan sebagai eksekutif sebanyak 150 Orang;
 - f. Tahun 2023 Jumlah perempuan sebagai legislatif sebanyak 7 Orang;
 - g. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (MCPR) tahun 2023 sebesar 71,15%;
 - h. Persentase Unmetneed (Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi) tahun 2023 sebesar 12,05%;
 - i. Angka kesertaan KB MKJP tahun 2023 sebesar 19,50%;
 - j. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan tahun 2023 sebesar 82,30%;
 - k. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) tahun 2023 sebesar 21,9%;
 - l. Jumlah Faskes yang siap melayani KB MKJP tahun 2023 sebanyak 84 Faskes;
 - m. Jumlah Kampung KB yang terbentuk tahun 2023 sebanyak 54 Kampung KB;
 - n. Jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI tahun 2023 sebanyak 29.689 Peserta;



- o. Tahun 2023 PPKBD sebanyak 208 Orang, Sub PPKBD sebanyak 937 Orang;
- p. Tahun 2023 Penyuluh KB sebanyak 47 Orang, Penyuluh Lapangan KB sebanyak 1 Orang, PPPK Penyuluh KB 5 sebanyak 5 Orang;
- q. Tahun 2023 Jumlah UPPKA sebanyak 1738 Kelompok;
- r. Jumlah pendamping keluarga tahun 2023 sebanyak 2259 Keluarga;
- s. Berdasarkan data Jumlah CATIN di tahun 2023 sebanyak 658 Pasangan, Jumlah BUMIL di tahun 2023 sebanyak 2976 Orang, Jumlah BULIN di tahun 2023 sebanyak 415 Orang, dan Jumlah BADUTA di tahun 2023 sebanyak 4090 Bayi.

Faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan kegiatan Dinas, antara lain:

- a. Pada P2TP2A terdapat permasalahan yakni Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) professional seperti ahli hukum, dan ahli psikolog;
- b. Terbentuknya PUSPAGA akan tetapi belum adanya anggaran untuk mendukung kegiatan pelaksanaan PUSPAGA;
- c. Belum terbentuknya UPTD dikarenakan masih proses penyusunan kajian;
- d. Berdasarkan tahun 2023 jumlah Balai Penyuluhan KB sebanyak 19 Kecamatan, 1 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Gesi perlu adanya pembangunan baru karena terjadi penghapusan asetnya disebabkan terkena relokasi Gedung Kantor Kecamatan Gesi;
- e. Kantor Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen yang saat ini merupakan aset dari Pemerintah Provinsi bukan milik aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, sehingga statusnya masih pinjam;

2.1.5. Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja program yang dilaksanakan oleh Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen tahun 2023, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang berdampak pada target capaian program Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, yaitu:

- 1) Cakupan korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapat pelayanan pengaduan (angka);
- 2) Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan pengaduan (angka);
- 3) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR);
- 4) Angka kesertaan KB MKJP



2.1.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk meningkatkan capaian kinerja dan mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain:

- 1) Melakukan evaluasi kinerja dan anggaran dari kegiatan yang sekiranya perlu untuk didahulukan sehingga menjadi kegiatan prioritas yang bisa dilakukan OPD;
- 2) Dalam perencanaan target kinerja, diupayakan berdasarkan kondisi yang sebenarnya dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Meningkatkan pemahaman dasar tentang dokumen perencanaan baik dari tingkat Pemangku Kebijakan tertinggi sampai Pelaksana Teknis Kegiatan, sehingga dokumen perencanaan tidak dianggap hanya sebagai kelengkapan administratif agar hasil pelaksanaan kegiatan dapat lebih terukur dan jelas;
- 4) Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, perhatian utama bukan hanya pada proses dan penyerapan/pencairan anggaran, tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor-faktor penting dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja untuk menghindari permasalahan

Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen pada tahun 2023 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)* Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
					Semua Bidang Urusan								
2	14	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase administrasi perkantoran tercukupi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	14	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2	14	01	2.02	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	29	27	28	103,70%	29	107,41%
2	14	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2	14	01	2.06	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	100%
2	14	01	2.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	100%
2	14	01	2.06	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	100%
2	14	01	2.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	100%
2	14	01	2.06	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38	64	38	41	107,90%	41	107,90%
2	14	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2 08 02		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan								
2 08 02 2.01		Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								
2 08 02 2.01 01		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PengarusutamaanGender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	0	1	1	100%	1	100%
2 08 02 2.01 04		Sub Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PengarusutamaanGender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25	25	25	100%	25	100%
2 08 02 2.02		Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								
2 08 02 2.02 01		Sub Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten / Kota	1	0	1	1	100%	1	100%
2 08 02 2.02 02		Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	27	0	27	27	100%	25	100%

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2	08	02	2.01	02	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	5	5	100%	5	5	100%
2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)									
2	08	06	2.01		Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									
2	08	06	2.01	01	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1	0	1	1	100%	1	1	100%
2	08	06	2.01	02	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	3	3	100%	3	3	100%
2	08	06	2.02		Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
2	08	06	2.02	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25	0	25	25	100%	25	25	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2	08	06	2.02	02	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	3	3	100%	3	3	100%
2	08	06	2.02	03	Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	3	3	100%	3	3	100%
2	08	06	2.02	04	Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	3	3	100%	3	3	100%
2	14				Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
2	14	02			Program Pengendalian Penduduk									
2	14	02	2.01		Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk									
2	14	02	2.01	02	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	3	0	4	4	100%	3	3	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2	14	02	2.02		Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
2	14	02	2.02	09	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	10	0	10	10	100%	10	10	100%
2	14	02	2.02	11	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	5	1	5	5	100%	5	5	100%
2	14	02	2.02	12	Sub Kegiatan : Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12	0	12	12	100%	12	12	100%
2	14	02	2.02	13	Sub Kegiatan : Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	12	12	12	100%	12	12	100%
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)									
2	14	03	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal									
2	14	03	2.01	01	Sub Kegiatan : Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	6	6	6	6	100%	6	6	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan(<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2	14	03	2.01	04	Sub Kegiatan : Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	11	11	11	11	100%	11	11	100%	
2	14	03	2.01	05	Sub Kegiatan : Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Program KKBPK	1	1	1	1	100%	0	1	100%	
2	14	03	2.01	06	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	20	20	20	20	100%	20	20	100%	
2	14	03	2.01	07	Sub Kegiatan : Pengelolaan Operasional dan Sarana Balai Penyuluh KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	12	12	12	100	12	12	100%	
2	14	03	2.01	07	Sub Kegiatan : Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4	4	4	4	100	4	4	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2	14	03	2.02		Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)									
2	14	03	2.02	01	Sub Kegiatan : Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan olh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2	14	03	2.02	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	4796	4796	4796	4796	100%	4796	4796	100%
2	14	03	2.02	04	Sub Kegiatan : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	208	208	208	208	100%	208	208	100%
2	14	03	2.03		Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota									
2	14	03	2.03	01	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	70	285	150	150	100%	70	135	192,86%
2	14	03	2.03	03	Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3500	3741	3500	4303	122,94%	3600	4303	122,94%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2	14	03	2.03	08	Sub Kegiatan : Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3	3	3	3	100%	3	3	100%
2	14	03	2.03	09	Sub Kegiatan : Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	44	44	44	44	100%	0	44	100%
2	14	03	2.03	10	Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	87	87	87	87	100%	87	87	99%
2	14	03	2.04		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									
2	14	03	2.04	01	Sub Kegiatan : Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2	2	2	2	100%	2	2	100%
2	14	03	2.04	02	Sub Kegiatan : Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1	1	1	1	100%	1	1	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2	14	03	2.04	03	Sub Kegiatan : Pelaksaaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	46	46	46	46	100%	46	46	100%
2	14	04			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)									
2	14	04	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
2	14	04	2.01	01	Sub Kegiatan : Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK- R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2	14	04	2.01	02	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15	15	15	15	100%	15	15	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2	14	04	2.01	06	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2259	2259	2259	2259	100%	2259	2259	100%	
2	14	04	2.02		Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										
2	14	04	2.02	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12	12	12	12	100%	12	12	100%	



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten 2021-2026 dan Renstra Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen. Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PPKB
PPPA
Kabupaten Sragen

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thnn-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thnn+1)	Tahun 2023 (thnn-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thnn+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
INDIKATOR KINERJA PD												
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)			0,11	0,09	0,06	0,05	0,76	0,76			
2.	Total Fertility Rate (TFR)			2,10	2,10	2,10	2,10	2,04	2,04			
3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			91,92	92,02	92,12	92,22	92,49	92,49			
4.	Angka Harapan Hidup Perempuan			78,14	78,34	78,54	78,74	77,89	77,89			
5.	Rata-rata Lama Sekolah Perempuan			7,53	7,73	7,93	8,13	6,93	7,33			
6.	Pengeluaran Perkapita Perempuan					11.633.301	11.807.801	11.292.000	11.360.000			
7.	Predikat Kabupaten Layak Anak					KLA Predikat Madya	KLA Predikat Madya		KLA Predikat Madya			



Keterangan : Indikator Kinerja Utama OPD 2021-2026 terdiri atas :

- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
- Total Fertility Rate (TFR)
- Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- Angka Harapan Hidup Perempuan
- Rata-rata Lama Sekolah Perempuan
- Pengeluaran Perkapita Perempuan
- Predikat Kabupaten Layak Anak

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 merupakan isu yang sedang dihadapi antara lain:

- 1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Kurang memahaminya konsep gender dan pengarusutamaan gender bagi pemangku kepentingan;
 - Tingginya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - Tingginya kasus pernikahan usia anak.
- 2) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Masih kurangnya penyuluh KB untuk 208 desa/kelurahan;
 - Kurangnya Minat KB Pria MOP

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan korban kekerasan karena dianggap tabu.
- 2) Masih kurangnya memahami tentang konsep pengarusutamaan gender bagi masyarakat.
- 3) Masih tingginya pernikahan usia anak.
- 4) Masih kurangnya kader penyuluh KB di 208 desa
- 5) Terkendala akan pandemi covid 19 sehingga penyelenggaraan pembinaan KB di lapangan menjadi belum terlaksana optimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan yang berpedoman kepada



RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 yang kemudian dijabarkan menjadi dokumen perencanaan tahunan berupa RKPD Kabupaten Sragen. Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) digunakan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerja pencapaian target renja dan tingkat kinerja yang dicapai, yang diselaraskan dengan rencana program dan kegiatan dan plafon pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah ditetapkan. Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 yang mengalami perubahan terkait program, kegiatan dan pagu indikatif anggaran terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025. Dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen mengusulkan untuk melaksanakan 8 (delapan) program, 19 (sembilan belas) kegiatan, 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp 16.939.607.004 (Enam belas milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu empat rupiah).

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025, Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2025 mengalami perubahan menyesuaikan anggaran daerah. Hasil analisis kebutuhan berdasarkan rewiu terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Sragen

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat daerah	100 %	5.013.335.804	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat daerah	100 %	5.013.335.804	
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	14 bulan	4.146.466.324	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	14 bulan	4.146.466.324	
1.	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	4.146.466.324	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	4.146.466.324	
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen	Terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	181.710.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen	Terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	181.710.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.814.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.814.000	
2.	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.856.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.856.000	
3.	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
4.	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.040.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.040.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	100.000.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	100.000.000	
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	302.771.595	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	302.771.595	
1.	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	77.142.836	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	77.142.836	
2.	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	24.970.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	24.970.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.658.759	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.658.759	
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	382.387.885	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	382.387.885	
1.	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	125 Unit	372.390.644	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	125 Unit	372.390.644	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	9.997.241	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	9.997.241	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
II	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen	% ARG pada belanja langsung APBD	35 %	216.400.000	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen	% ARG pada belanja langsung APBD	35 %	216.400.000	
			Cakupan korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapat pelayanan pengaduan (angka)	100 %				Cakupan korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapat pelayanan pengaduan (angka)	100 %		
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG	90 %	25.000.000	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG	90 %	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	
2.	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	35 Orang	15.000.000	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	35 Orang	15.000.000	
2.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen	Rasio Perempuan di Legislatif	31 %	24.000.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen	Rasio Perempuan di Legislatif	31 %	22.000.000	
			Rasio Perempuan di Eksekutif	80 %				Rasio Perempuan di Eksekutif	80 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000	
2.	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Organisasi	20.000.000	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Organisasi	20.000.000	
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PPKBP PPA	Rasio KDRT	3,60	110.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PPKBP PPA	Rasio KDRT	3,60	59.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	10 Lembaga	55.400.000	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	10 Lembaga	55.400.000	
2.	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	30 Orang	59.000.000	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	30 Orang	59.000.000	
3.	Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	42.000.000	Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	42.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III	Program Perlindungan Perempuan	Dinas PPKBP PPA	Rasio KDRT Perempuan	0,28 %	31.000.000	Program Perlindungan Perempuan	Dinas PPKBP PPA	Rasio KDRT Perempuan	0,28 %	31.000.000	
			Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan pengaduan (angka)	90 %				Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan pengaduan (angka)	90 %		
1.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PPKBP PPA	Cakupan Perempuan yang mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	0,037 %	31.000.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PPKBP PPA	Cakupan Perempuan yang mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	0,037 %	31.000.000	
1.	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	16.000.000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	16.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	15.000.000	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	15.000.000	
IV	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas PPKBP PPA	Peningkatan kapasitas lembaga dalam partisipasi pemenuhan hak dan perlindungan anak	70 %	218.000.000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas PPKBP PPA	Peningkatan kapasitas lembaga dalam partisipasi pemenuhan hak dan perlindungan anak	70 %	218.000.000	
			Persentase cakupan pendampingan forum anak	60 %				Persentase cakupan pendampingan forum anak	60 %		
1.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PPKBP PPA	Peningkatan Kapasitas DEKELA dalam Pemenuhan Hak Anak	44,23 %	68.000.000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PPKBP PPA	Peningkatan Kapasitas DEKELA dalam Pemenuhan Hak Anak	44,23 %	68.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi	68.000.000	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi	68.000.000	
2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PPKBP PPA	Peningkatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak	90 %	150.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PPKBP PPA	Peningkatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak	90 %	150.000.000	
1.	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	55.000.000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	55.000.000	
3.	Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	70.000.000	Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	70.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
V	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas PPKBP PPA	Rasio KDRT Anak	0,008 %	40.000.000	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas PPKBP PPA	Rasio KDRT Anak	0,008 %	40.000.000	
1.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PPKBP PPA	Cakupan anak yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	0,037%	40.000.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PPKBP PPA	Cakupan anak yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	0,037%	40.000.000	
1.	Sub Kegiatan : Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak, dan DRPPA		Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 Kegiatan	40.000.000	Sub Kegiatan : Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak, dan DRPPA		Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 Kegiatan	40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VI	Program Pengendalian Penduduk	Dinas PPKBP PPA	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	66,36 %	635.600.000	Program Pengendalian Penduduk	Dinas PPKBP PPA	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	66,36 %	635.600.000	
1.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dinas PPKBP PPA	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	90 %	20.000.000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dinas PPKBP PPA	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	90 %	20.000.000	
1.	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	
2.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PPKBPPA	Persentase Cakupan Pemetaan Pengendalian Penduduk	53,5 %	615.600.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PPKBPPA	Persentase Cakupan Pemetaan Pengendalian Penduduk	53,5 %	615.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	10 Laporan	60.000.000	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	10 Laporan	60.000.000	
2.	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	5 Dokumen	90.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	5 Dokumen	90.000.000	
3.	Sub Kegiatan : Pencatatan dan Pengumpulan Data		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	225.600.000	Sub Kegiatan : Pencatatan dan Pengumpulan Data		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	225.600.000	
4.	Sub Kegiatan : Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	240.000.000	Sub Kegiatan : Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	240.000.000	
VII	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP PPA	Angka kesertaan KB MKJP	27,20 %	5.669.621.200	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP PPA	Angka kesertaan KB MKJP	27,20 %	5.669.621.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas PPKBP PPA	Terlaksananya Rapat Koordinasi BOKB	100 %	1.792.000.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas PPKBP PPA	Terlaksananya Rapat Koordinasi BOKB	100 %	1.792.000.000	
			Terlaksananya Kecamatan yang Mendapatkan media KIE	100 %				Terlaksananya Kecamatan yang Mendapatkan media KIE	100 %		
			Terlaksananya Kegiatan Penyuluh KKBPK di Balai Penyuluh	100 %				Terlaksananya Kegiatan Penyuluh KKBPK di Balai Penyuluh	100 %		
1.	Sub Kegiatan : Pengendalian Program KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	80.000.000	Sub Kegiatan : Pengendalian Program KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	80.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Sub Kegiatan : Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	992..000.000	Sub Kegiatan : Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	992..000.000	
3.	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	20 Laporan	387.000.000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	20 Laporan	387.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	Sub Kegiatan : Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	11 Dokumen	158.000.000	Sub Kegiatan : Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	11 Dokumen	158.000.000	
5.	Sub Kegiatan : Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	6 Organisasi	175.000.000	Sub Kegiatan : Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	6 Organisasi	175.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Dinas PPKBPP PA	Pelaksanaan Pembinaan KADER KB Ke Masyarakat	4992 Kegiatan	890.212.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Dinas PPKBPP PA	Pelaksanaan Pembinaan KADER KB Ke Masyarakat	4992 Kegiatan	890.212.000	
1.	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB		Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	4796 Unit	6.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB		Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	4796 Unit	6.000.000	
2.	Sub Kegiatan : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	208 Orang	624.000.000	Sub Kegiatan : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	208 Orang	624.000.000	
3.	Sub Kegiatan : Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi	260.212.000	Sub Kegiatan : Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi	260.212.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PPKBP PPA	Terlaksananya Visitasi dan Registrasi Klinik KB	90 %	2.260.279.300	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Visitasi dan Registrasi Klinik KB	90 %	2.260.279.300	
1..	Sub Kegiatan : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	70 Laporan	75.600.000	Sub Kegiatan : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	70 Laporan	75.600.000	
2.	Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3600 Orang	1.835.794.000	Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3600 Orang	1.835.794.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Sub Kegiatan : Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3 Laporan	204.494.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3 Laporan	204.494.000	
4.	Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	60 Orang	25.000.000	Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	60 Orang	25.000.000	
5.	Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan KB Pria		Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	5 Orang	7.000.000	Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan KB Pria		Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	5 Orang	7.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.	Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	50 Orang	12.271.300	Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	50 Orang	12.271.300	
4.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dinas PPKBP PPA	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan POKJA Kampung KB, Lini Lapangan dan Tribina di Kampung KB	240 Kegiatan	725.025.00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dinas PPKBP PPA	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan POKJA Kampung KB, Lini Lapangan dan Tribina di Kampung KB	240 Kegiatan	750.025.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Sub Kegiatan : Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2 Organisasi	19.999.900	Sub Kegiatan : Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2 Organisasi	19.999.900	
2.	Sub Kegiatan : Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	3.750.000	Sub Kegiatan : Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	3.750.000	
3.	Sub Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	46 Kampung	803.500.000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	46 Kampung	803.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VIII	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas PPKBP PPA	Penguatan Peran PIK-Remaja Proyek Nasional dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	100 %	5.115.650.000	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas PPKBP PPA	Penguatan Peran PIK-Remaja Proyek Nasional dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	100 %	5.115.650.000	
			Persentase UPPKS yang mendapatkan pembinaan	100 %				Persentase UPPKS yang mendapatkan pembinaan	100 %		
1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas PPKBP PPA	Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kampung KB	25 Kegiatan	363.800.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas PPKBP PPA	Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kampung KB	25 Kegiatan	363.800.000	
1.	Sub Kegiatan : Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		Jumlah Laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	6 Laporan / Dokumen	28.800.000	Sub Kegiatan : Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		Jumlah Laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	6 Laporan / Dokumen	28.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Unit	300.000.000	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Unit	300.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Sub Kegiatan : Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	1 Kelompok	35.000.000	Sub Kegiatan : Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	1 Kelompok	35.000.000	
2.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas PPKB PPPA	Pelaksanaan Pembinaan POKTAN BKB/BKR/BKL	1 Kegiatan	4.751.850.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas PPKBPP PA	Pelaksanaan Pembinaan POKTAN BKB/BKR/BKL	1 Kegiatan	4.751.850.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Organisasi	7.950.000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Organisasi	7.950.000	
2.	Sub Kegiatan : Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 Laporan	2.259.000.000	Sub Kegiatan : Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 Laporan	2.259.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Sub Kegiatan : Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 Laporan	2.489.900.000	Sub Kegiatan : Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 Laporan	2.489.900.000	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan persiapan yang meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD dengan berpedoman pada Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Rancangan Awal Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun sebelum dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan sebelum pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, sehingga belum ada usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen selaku Perangkat Daerah, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Sragen. Sistem perencanaan pembangunan nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yang terintegrasi kedalam suatu dokumen perencanaan. Kelima pendekatan ini meliputi pendekatan politik, teknologi.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Sragen

Nama Perangkat Daerah : Dinas PPKB PPPA

No	Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(12)
NIHIL						

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam proses penyusunan Rancangan RENJA Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2025, telah dilakukan penalaran terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1.1. Telaahan terhadap Agenda Pembangunan Nasional

Berdasarkan pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional didukung pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. Visi tersebut adalah ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***, yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi, yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan “Nawacita Kedua”, yakni :

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;



- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
- 7) Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, sektor-sektor pembangunan lain yang tidak disebutkan tetap dilakukan dalam mendukung pencapaian visi dan misi di atas.

3.1.2. Telaahan terhadap Renstra dan/atau Renja Kementerian

Sehubungan dengan Resntra dan Renja Kementerian PPPA dan BKKBN Tahun 2025 belum di terbitkan, maka telaahan terhadap Renstra dan/atau Renja Kementerian masih menggunakan Renstra Kementerian PPPA dan BKKBN Tahun 2020-2024 yang berisi uraian tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi merupakan penjabaran Agenda Pembangunan Tahun 2020–2024, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024, tugas dan fungsi Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen yang terkait dengan tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan tahun 2020-2024, yaitu:

1. Tujuan Strategis

“Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak”, dan “Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel”

2. Sasaran Strategis

“Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak untuk mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak”, dan “Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel”

3. Arah Kebijakan

- a. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai Bidang Pembangunan;



- b. Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya;
- c. Peningkatan sinergitas dan kerja sama antara Kemen PPPA dengan Lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Peningkatan perlindungan hak perempuan;
- e. Peningkatan perlindungan khusus anak;
- f. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024, tugas dan fungsi Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen yang terkait dengan tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan tahun 2020-2024, yaitu:

1.

Berdasarkan 7 (tujuh) agenda besar pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Sragen menjabarkan kedalam visi misi yang diimplementasikan didalam strategi dan kebijakan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja dan pendanaan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, Visi Pembangunan yakni ***“Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera Dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”***. Didalam renja tahun 2025 merupakan tahap ke-empat atau tahun ke-empat dalam pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026. Dalam mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- 2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi;
- 3) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan;
- 4) Menangani Kemiskinan, Memperluas Kesempatan Kerja;
- 5) Mewujudkan Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan serta Berwawasan Lingkungan Dengan Semangat Gotong Royong.

Mengacu pada kebijakan pada RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 untuk Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen, memuat program prioritas, yakni



- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Program Perlindungan Perempuan;
- 3) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- 4) Program Perlindungan Khuaus Anak;
- 5) Program Pengendalian Penduduk;
- 6) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- 7) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- 8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, tujuan dan sasaran Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2025 berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2025 juga disusun berpedoman kepada hasil evaluasi Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen tahun lalu dan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Dalam mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Sragen terpilih tahun 2021-2026 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 yaitu:

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan	: Meningkatkan pengarusutamaan gender serta perlindungan anak.
Indikator tujuan	: Indeks Pembangunan Gender (IPG).
Sasaran	: Meningkatnya kualitas keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Indikator sasaran	: Angka harapan hidup perempuan, Rata-rata lama sekolah perempuan, Pengeluaran perkapita perempuan, Predikat Kabupaten Layak Anak
Strategi	: - Melalui penyusunan Perencanaan dan



Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan menggunakan analisis GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement).

- Mengoptimalkan kualitas pemenuhan dan perlindungan anak.
- Arah kebijakan : - Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dan kesertaan gender
- Mewujudkan kabupaten layak anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan : Mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan pengendalian jumlah penduduk.

Indikator tujuan : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Sasaran : Terkendalinya jumlah penduduk.

Indikator sasaran : Total Fertility Rate (TFR)

Strategi : - Penguatnya pemanduan dan sinkronisasi kebijakan penduduk

- Arah kebijakan : - Membuat sistem informasi keluarga yang terintergrasi
- Meningkatkan advokasi dan penggerakan program bangga kencana
 - Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan yang berfokus pada segmentasi sasaran
 - Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup
 - Memperkuat pembentukan karakter di keluarga

Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen pada tahun 2021–2026 juga menetapkan tujuan penunjang dan sasaran penunjang, sebagaimana tertuang dalam dokumen *cascading* kinerja dan Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, yaitu:

Tujuan Penunjang : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Tujuan Penunjang : Predikat Akuntabilitas Kinerja (Predikat SAKIP) Perangkat Daerah.



Sasaran Penunjang : **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.**

Sasaran Penunjang : Predikat kinerja SAKIP Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:

1. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tujuan dan sasaran Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, serta tema pembangunan daerah tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.
2. Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs).

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 adalah sebesar Rp. 15.955.498.774 (Lima belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) meliputi 8 (delapan) Program, 19 (Sembilan belas) Kegiatan, 53 (lima puluh tiga) Sub Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD tahun 2025 Kabupaten Sragen dan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik dari APBN tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terdiri Sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah
Terdiri Sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri Sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Terdiri Sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdiri Sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota

2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdiri Sub Kegiatan :

- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdiri Sub kegiatan :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota
- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Perlindungan Perempuan

1) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri Sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdiri Sub kegiatan :



- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Terdiri Sub kegiatan :
 - Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 5. Program Perlindungan Khusus Anak
 - 1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Terdiri Sub Kegiatan :
 - Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
- 6. Program Pengendalian Penduduk
 - 1) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
Terdiri Sub Kegiatan :
 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
 - 2) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Terdiri Sub kegiatan :
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
- 7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - 1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
Terdiri Sub kegiatan :
 - Pengendalian Program KKBPK
 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana



- Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
- 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- Terdiri Sub kegiatan :
- Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
- 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- Terdiri Sub kegiatan :
- Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - Peningkatan Kesertaan KB Pria
 - Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
- 4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- Terdiri Sub kegiatan :
- Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)



1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Terdiri Sub kegiatan :

- Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
- Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
- Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Terdiri Sub kegiatan :

- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
- Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Sragen
Nama Perangkat Daerah : Dinas PPKB PPPA
lembar dari

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								500.000.000
2	08	02				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	% ARG pada belanja langsung APBD	Dinas PPKBPPPA Kab. Sragen	35 %	216.400.000			35 %	180.000.000
							Cakupan korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapat pelayanan pengaduan (angka)		100 %				100%	
2	08	02	2	01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG		90 %	25.000.000			90 %	15.000.000
2	08	02	2	01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	10.000.000	DAU APBD		1 Dokumen	25.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	02	2	01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG		35 Orang	15.000.000	DAU APBD		-	0
2	08	02	2	02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Perempuan di Eksekutif		75 %	35.000.000			75 %	45.000.000
							Rasio Perempuan di Legislatif		35 %				35 %	
2	08	02	2	02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	15.000.000	DAU APBD		1 Dokumen	20.000.000
2	08	02	2	02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Organisasi	20.000.000	DAU APBD		10 Organisasi	25.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	02	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio KDRT		3,60	110.000.000			3,60	120.000.000
2	08	02	2	03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan		10 Lembaga	55.400.000	DAU APBD		10 Lembaga	55.000.000
2	08	02	2	03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan		30 Orang	59.000.000	DAU APBD		30 Orang	13.000.000
2	08	02	2	03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		3 Dokumen	42.000.000	DAU APBD		3 Dokumen	50.000.000
2	08	03				Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT Perempuan	Dinas PPKBPPPA Kab. Sragen	0,28 %	31.000.000			0,28 %	40.000.000
						Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan pengaduan (angka)			90 %				90 %	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	03	2	01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Perempuan yang Mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan		0,037 %	31.000.000			0,036 %	40.000.000
2	08	03	2	01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Dokumen	16.000.000	DAU APBD, DAK Non Fisik APBN		3 Dokumen	20.000.000
2	08	03	2	01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Perangkat Daerah	15.000.000	DAU APBD		1 Perangkat Daerah	20.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	06				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Peningkatan kapasitas lembaga dalam partisipasi pemenuhan hak dan perlindungan anak	Dinas PPKBPPPA Kab. Sragen	70 %	218.000.000			75 %	235.000.000
							Persentase cakupan pendampingan forum anak		60 %				70 %	
2	08	06	2	01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas DEKELA dalam Pemenuhan Hak Anak		44,23 %	68.000.000			44,23 %	70.000.000
2	08	06	2	01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		1 Organisasi	68.000.000	DAU APBD		1 Organisasi	70.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	06	2	02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak		90 %	150.000.000			90 %	165.000.000
2	08	06	2	02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		25 Orang	25.000.000	DAU APBD		25 Orang	30.000.000
2	08	06	2	02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Dokumen	55.000.000	DAU APBD		3 Dokumen	60.000.000
2	08	06	2	02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Dokumen	70.000.000	DAU APBD		3 Dokumen	75.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	07				Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio KDRT Anak	Dinas PPKBPPPA Kab. Sragen	0,008 %	40.000.000			0,006 %	45.000.000
2	08	07	2	01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan anak yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak		0,036%	40.000.000			0,036 %	45.000.000
2	08	07	2	01	0004	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu		2 Kegiatan	40.000.000	DAK Non Fisik APBN		2 Kegiatan	45.000.000
2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				16.434.207.004				14.295.444.000
2	14	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Dinas PPKBPPPA Kab. Sragen	100 %	5.013.335.804			100 %	4.865.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	14	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14 bulan	4.146.466.324			14 bulan	4.000.000.000
2	14	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		27 Orang/bulan	4.146.466.324	DAU APBD		27 Orang/bulan	4.000.000.000
2	14	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 bulan	181.710.000			12 bulan	220.000.000
2	14	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	8.814.000	DAU APBD		1 Paket	20.000.000
2	14	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	54.856.000	DAU APBD		1 Paket	20.000.000
2	14	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	10.000.000	DAU APBD		1 Paket	15.000.000
2	14	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	8.040.000	DAU APBD		1 Paket	15.000.000
2	14	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		38 Laporan	100.000.000	DAU APBD		38 Laporan	150.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	14	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan	302.771.595			12 bulan	370.000.000
2	14	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48 Laporan	77.142.836	DAU APBD		48 Laporan	90.000.000
2	14	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Laporan	24.970.000	DAU APBD		4 Laporan	30.000.000
2	14	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	200.658.759	DAU APBD		12 Laporan	250.000.000
2	14	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 bulan	382.387.885			12 bulan	275.000.000
2	14	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		123 Unit	372.390.644	DAU APBD		123 Unit	260.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	14	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	9.997.241	DAU APBD		2 Unit	9.997.241
2	14	02				Program Pengendalian Penduduk	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	Dinas PPKBPPPA Kab. Sragen	66,30 %	635.600.000			67,02 %	522.400.000
2	14	02	2	01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk		90 %	20.000.000			90 %	25.000.000
2	14	02	2	01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		3 Dokumen	20.000.000	DAU APBD		3 Dokumen	25.000.000
2	14	02	2	02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pemetaan Pengendalian Penduduk		42,8 %	615.600.000			42,8 %	497.400.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	14	02	2	02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		10 Laporan	60.000.000	DAK Non Fisik APBN		10 Laporan	65.000.000
2	14	02	2	02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya		5 Dokumen	90.000.000	DAU APBD		5 Dokumen	100.000.000
2	14	02	2	02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		1 Laporan	225.600.000	DAK Non Fisik APBN		1 Laporan	212.400.000
2	14	02	2	02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		12 Dokumen	240.000.000	DAK Non Fisik APBN		12 Dokumen	120.000.000
2	14	03				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka kesertaan KB MKJP	Dinas PPKBPPPA Kab. Sragen	27,20 %	5.669.621.200			27,20 %	3.780.344.000
2	14	03	2	01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Rapat Koordinasi BOKB		100 %	1.792.000.000			100 %	1.649.000.000
							Terlaksananya Kecamatan yang Mendapatkan media KIE		100 %				100 %	
							Terlaksananya Kegiatan Penyuluh KKBPK di Balai Penyuluh		100 %				100 %	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	14	03	2	01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		4 Laporan	80.000.000	DAK Non Fisik APBN		4 Laporan	80.000.000
2	14	03	2	01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		12 Laporan	992.000.000	DAK Non Fisik APBN		12 Laporan	992.000.000
2	14	03	2	01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		20 Laporan	387.000.000	DAK Non Fisik APBN		20 Laporan	387.000.000
2	14	03	2	01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		11 Dokumen	158.000.000	DAU APBD, DAK Non Fisik APBN		11 Dokumen	15.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	14	03	2	01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		6 Organisasi	175.000.000	DAK Non Fisik APBN		6 Organisasi	175.000.000
2	14	03	2	02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pelaksanaan Pembinaan KADER KB Ke Masyarakat		4992 Kegiatan	890.212.000			4992 Kegiatan	939.000.000
2	14	03	2	02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia		4796 Unit	6.000.000	DAU APBD		4796 Unit	15.000.000
2	14	03	2	02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		208 Orang	624.000.000	DAK Non Fisik APBN		208 Orang	624.000.000
2	14	03	2	02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		1 Organisasi	260.212.000	DAU APBD, DAK Non Fisik APBN		208 Orang	300.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	14	03	2	03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Visitasi dan Registrasi Klinik KB		90 %	2.160.159.300			90 %	355.094.000
2	14	03	2	03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		70 Laporan	75.600.000	DAK Non Fisik APBN		70 Laporan	75.600.000
2	14	03	2	03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		3600 Orang	1.835.794.000	DAU APBD, DAK Non Fisik APBN		3600 Orang	15.000.000
2	14	03	2	03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		10 Laporan	204.494.000	DAK Non Fisik APBN		10 Laporan	204.494.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	14	03	2	03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		87 Orang	25.000.000	DAU APBD		87 Orang	30.000.000
2	14	03	2	03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria		5 Orang	7.000.000	DAU APBD		5 Orang	15.000.000
2	14	03	2	03	0013	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB		50 Orang	12.271.300	DAU APBD		50 Orang	15.000.000
2	14	03	2	04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan POKJA Kampung KB, Lini Lapangan dan Tribina di Kampung KB		240 Kegiatan	827.249.900			240 Kegiatan	837.250.000
2	14	03	2	04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		2 Organisasi	19.999.900	DAU APBD		2 Organisasi	30.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	14	03	2	04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		1 Dokumen	3.750.000	DAK Non Fisik APBN		1 Dokumen	3.750.000
2	14	03	2	04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		46 Kampung	803.500.000	DAK Non Fisik APBN		46 Kampung	803.500.000
2	14	04				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Penguatan Peran PIK-Remaja Proyek Nasional dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	Dinas PPKBPPPA Kab. Sragen	100 %	5.115.650.000			100 %	5.127.700.000
							Persentase UPPKS yang mendapatkan pembinaan		100 %				100 %	
2	14	04	2	01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kampung KB		25 Kegiatan	363.800.000			25 Kegiatan	363.800.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	14	04	2	01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Jumlah Laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		6 Laporan / Dokumen	28.800.000	DAK Non Fisik APBN		6 Laporan / Dokumen	28.800.000
2	14	04	2	01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia		10 Unit	300.000.000	DAK Non Fisik APBN		10 Unit	300.000.000
2	14	04	2	01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk		1 Kelompok	35.000.000	DAU APBD		1 Kelompok	40.000.000
2	14	04	2	02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembinaan POKTAN BKB/BKR/BKL		1 Kegiatan	4.751.850.000			1 Kegiatan	4.751.850.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	14	04	2	02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		12 Organisasi	7.950.000	DAU APBD		12 Organisasi	15.000.000
2	14	04	2	02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		10 Laporan	2.259.000.000	DAK Non Fisik APBN		10 Laporan	2.259.000.000
2	14	04	2	02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan		10 Laporan	2.484.900.000	DAK Non Fisik APBN		10 Laporan	2.484.900.000

Sumber Data : Rencana Kerja Laporan Tahun 2025 Di SIPD

Catatan:

- Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama Perangkat Daerah, nomor lembar dan jumlah lembar, pada table diatas
- Pengisian tabel berdasarkan hasil hitungan pada TabelT-B.36



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak merupakan program prioritas urusan wajib bukan pelayanan dasar dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PPKB PPPA. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, kemudian dijabarkan Dinas PPKB PPPA kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Dalam pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas PPKB PPPA. Kegiatan yang dipilih, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PPKB PPPA.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terdiri Sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terdiri Sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri Sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri Sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdiri Sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota

- b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdiri Sub Kegiatan :

- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdiri Sub kegiatan :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota
- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Perlindungan Perempuan

- a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri Sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota



- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdiri Sub kegiatan :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdiri Sub kegiatan :

- Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Perlindungan Khusus Anak

- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri Sub Kegiatan :

- Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA

6. Program Pengendalian Penduduk

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Terdiri Sub Kegiatan :

- Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri Sub kegiatan :



- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
- Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
- Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
- Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Terdiri Sub kegiatan :

- Pengendalian Program KKBPK
- Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
- Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
- Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
- Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Terdiri Sub kegiatan :

- Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
- Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri Sub kegiatan :

- Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)



- Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - Peningkatan Kesertaan KB Pria
 - Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Terdiri Sub kegiatan :

- Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
- Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Terdiri Sub kegiatan :

- Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Terdiri Sub kegiatan :



- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
- Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

Tabel 4. Rencana Kerja dan Pendanaan Anggaran

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja (Hasil Program/ Keluaran Kegiatan/ Keluaran Subkegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
											Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Misi Pertama Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026: “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”. - Tujuan: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan keluarga. - Sasaran: Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan anak. - Tema Pembangunan Tahun 2025: Akselerasi dan Pemantapan Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup.							16.912.149.763			
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Peningkatan kualitas SDM dan Kualitas hidup masyarakat	Tujuan: Meningkatkan pengarusutamaan gender serta perlindungan anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,02 %	505.400.000	92,12 %	180.000.000		Kepala Dinas	
						Sasaran: Meningkatnya kualitas keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Angka harapan hidup perempuan	78,34 %	78,54 %							
								Rata-rata lama sekolah perempuan	7,73 Tahun	7,93 Tahun							
								Pengeluaran perkapita perempuan	11.984. 918 Rupiah /tahun	12.164. 692 Rupiah /tahun							
								Predikat Kabupaten Layak Anak	KLA Predika t Nindya	KLA Predika t Nindya							
2	12	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Dinas PPKBPPP A Kab. Sragen		% ARG pada belanja langsung APBD	31%	216.400.000	35%	180.000.000		Kepala Dinas
											Cakupan korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapat pelayanan pengaduan (angka)	80%		100%			

Kode						Indikator Kinerja (Hasil Program/ Keluaran Kegiatan/ Keluaran Subkegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1						7	8	9	10		11	12
2	08	02	2	01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						Kepala Bidang PPPA
2	08	02	2	01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG						Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2	08	02	2	01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota						Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2	08	02	2	02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						Kepala Bidang PPPA
						Rasio Perempuan di Eksekutif	75 %	35.000.000	75 %	45.000.000		
						Rasio Perempuan di Legislatif	35 %		35 %			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja (Hasil Program/ Keluaran Kegiatan/ Keluaran Subkegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
											Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
2	08	02	2	02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi					Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokum en	15.000.000	1 Dokum en	20.000.000		Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2	08	02	2	02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Organi sasi	20.000.000	10 Organis asi	25.000.000		Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2	08	02	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					Rasio KDRT	3,60 %	110.000.000	3,50 %	120.000.000		Kepala Bidang PPPA
2	08	02	2	03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	10 Lemba ga	55.400.000	10 Lemba ga	55.000.000		Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak

Kode							Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja (Hasil Program/ Keluaran Kegiatan/ Keluaran Subkegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
												Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
2	08	0	2	2	03	000 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	30 Orang	59.000.000	30 Orang	13.000.000		Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2	08	0	2	2	03	000 3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokum en	42.000.000	3 Dokum en	50.000.000		Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
08	03						Program Perlindungan Perempuan			Dinas PPKBPPP A Kab. Sragen		Rasio KDRT Perempuan	0,28 %	31.000.000	0,28 %	40.000.000		Kepala Dinas
												Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan pengaduan (angka)	90 %		90 %			
08	03	2	01				Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					Cakupan Perempuan yang Mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	0,036 %	81.399.800	0,036 %	95.000.000		Kepala Bidang PPPA

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja (Hasil Program/ Keluaran Kegiatan/ Keluaran Subkegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
											Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
2	08	03	2	01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	16.000.000	3 Dokumen	20.000.000		Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak
2	08	03	2	01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	15.000.000	1 Perangkat Daerah	20.000.000		Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak
2	08	06				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)			Dinas PPKBPPP A Kab. Sragen		Peningkatan kapasitas lembaga dalam partisipasi pemenuhan hak dan perlindungan anak	70 %	218.000.000	75 %	235.000.000		Kepala Dinas
											Persentase cakupan pendampingan forum anak	60 %		70 %			

Kode						Indikator Kinerja (Hasil Program/ Keluaran Kegiatan/ Keluaran Subkegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1						7	8	9	10		11	12
2	08	06	2	01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						Kepala Bidang PPPA
2	08	06	2	01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						Seksi Pemenuhan Hak Anak
2	08	06	2	02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						Kepala Bidang PPPA
						Persentase Petugas yang telah dilatih Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan	44,23 %	68.000.000	15 %	56.489.000		
						Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi	68.000.000	1 Organisasi	70.000.000		
						Peningkatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak	90 %	150.000.000	90 %	165.000.000		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja (Hasil Program/ Keluaran Kegiatan/ Keluaran Subkegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
											Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
2	08	06	2	02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25.000.000	25 Orang	30.000.000		Seksi Pemenuhan Hak Anak
2	08	06	2	02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	55.000.000	3 Dokumen	60.000.000		Seksi Pemenuhan Hak Anak
2	08	06	2	02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	75.000.000		Seksi Pemenuhan Hak Anak

Kode							Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja (Hasil Program/ Keluaran Kegiatan/ Keluaran Subkegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
												Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
2	08	07					Program Perlindungan Khusus Anak			Dinas PPKBPPP A Kab. Sragen		Rasio KDRT Anak	0,008 %	40.000.000	0,006 %	45.000.000		Kepala Dinas
2	08	07	2	01			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					Cakupan anak yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	0,036 %	40.000.000	0,036 %	45.000.000		Kepala Bidang PPPA
2	08	07	2	01	000 4		Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak, dan DRPPA					Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 Kegia tan	40.000.000	2 Kegia tan	45.000.000		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja (Hasil Program/ Keluaran Kegiatan/ Keluaran Subkegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2025		Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab	
											Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Misi Pertama Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026: “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”. - Tujuan: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan keluarga. - Sasaran: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan keluarga - Tema Pembangunan Tahun 2025: Akselerasi dan Pemantapan Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup.											
2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah, serta Pemantapan Kapasitas Fiskal Daerah	Tujuan: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Predikat Akuntabilitas Kinerja (Predikat SAKIP) Perangkat Daerah (Predikat/Nilai)	BB (70,40)	16.434.207.004	BB (70,50)	14.295.444.000			Kepala Dinas	
					Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Predikat kinerja SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen (Predikat/Nilai)	BB (70,40)	BB (70,50)								
					Peningkatan kualitas SDM dan Kualitas hidup masyarakat		Tujuan: Mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan pengendalian jumlah penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,09 %	0,06 %							Kepala Dinas
							Sasaran: Terkendalinya jumlah penduduk		Total Fertility Rate (TFR)	2,10 Anak	2,10 Anak							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja (Hasil Program/ Keluaran Kegiatan/ Keluaran Subkegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
											Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
2	14	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Dinas PPKBPPP A Kab. Sragen		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.013.335.804	100 %	4.865.000.000		Kepala Dinas
2	14	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 bulan	4.146.466.324	14 bulan	4.000.000.000		Sekretaris Dinas
2	14	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/ bulan	4.146.466.324	27 Orang/ bulan	4.000.000.000		Subbagian Umum dan Kepegawaian
2	14	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	181.710.000	12 bulan	220.000.000		Sekretaris Dinas
2	14	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.814.000	1 Paket	20.000.000		Subbagian Umum dan Kepegawaian
2	14	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.856.000	1 Paket	20.000.000		Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja (Hasil Program/ Keluaran Kegiatan/ Keluaran Subkegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
											Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
2	14	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	1 Paket	15.000.000		Subbagian Umum dan Kepegawaian
2	14	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.040.000	1 Paket	15.000.000		Subbagian Umum dan Kepegawaian
2	14	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	100.000.000	38 Laporan	150.000.000		Subbagian Umum dan Kepegawaian
2	14	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	302.771.595	12 bulan	370.000.000		Sekretaris Dinas
2	14	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	77.142.836	48 Laporan	90.000.000		Subbagian Umum dan Kepegawaian
2	14	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	24.970.000	4 Laporan	30.000.000		Subbagian Umum dan Kepegawaian
2	14	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.658.759	12 Laporan	250.000.000		Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja (Hasil Program/ Keluaran Kegiatan/ Keluaran Subkegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
											Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
2	14	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	382.387.885	12 bulan	275.000.000		Sekretaris Dinas
2	14	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	123 Unit	372.390.644	123 Unit	260.000.000		Subbagian Umum dan Kepegawaian
2	14	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	2 Unit	9.997.241	2 Unit	9.997.241		Subbagian Umum dan Kepegawaian
2	14	02				Program Pengendalian Penduduk			Dinas PPKBPPP A Kab. Sragen		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	66,30 %	635.600.000	67,02 %	522.400.000		Kepala Dinas
2	14	02	2	01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					Persentase keterlibatan stackholder dalam pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	90 %	20.000.000	90 %	25.000.000		Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja (Hasil Program/ Keluaran Kegiatan/ Keluaran Subkegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
											Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
2	14	02	2	01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	25.000.000		Seksi Advokasi dan Penggerakan
2	14	02	2	02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					Persentase Cakupan Pemetaan Pengendalian Penduduk	42,8 %	615.600.000	42,8 %	497.400.000		Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan
2	14	02	2	02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	10 Laporan	60.000.000	10 Laporan	65.000.000		Subbagian Umum dan Kepegawaian
2	14	02	2	02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga					Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	5 Dokumen	90.000.000	5 Dokumen	100.000.000		Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
2	14	02	2	02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	225.600.000	1 Laporan	212.400.000		Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
2	14	02	2	02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	240.000.000	12 Dokumen	120.000.000		Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja (Hasil Program/ Keluaran Kegiatan/ Keluaran Subkegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
											Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
2	14	03				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)			Dinas PPKBPPP A Kab. Sragen		Angka kesertaan KB MKJP	27,20 %	5.669.621.200	27,20 %	3.780.344.000		Kepala Dinas
2	14	03	2	01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal					Terlaksananya Rapat Koordinasi BOKB	100 %	1.792.000.000	100 %	1.649.000.000		Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan , Kepala Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
											Terlaksananya Kecamatan yang Mendapatkan media KIE	100 %		100 %			
											Terlaksananya Kegiatan Penyuluh KKBPK di Balai Penyuluh	100 %		100 %			
2	14	03	2	01	0008	Pengendalian Program KKBPK					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Lapora n	80.000.000	4 Laporan	80.000.000		Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
2	14	03	2	01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Lapora n	963.000.000	12 Laporan	970.000.000		Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kode							Indikator Kinerja (Hasil Program/ Keluaran Kegiatan/ Keluaran Subkegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
							Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1							7	8	9	10		11	12
2	14	03	2	01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)							Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB
2	14	03	2	01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang							Seksi Advokasi dan Penggerakan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja (Hasil Program/ Keluaran Kegiatan/ Keluaran Subkegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
1						2	3	4	5	6	Tolok Ukur	Target	9	Target	Pagu Indikatif (Rp)	11	12
2	14	03	2	01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	6 Organis asi	175.000.000	6 Organis asi	175.000.000		Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
2	14	03	2	02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					Pelaksanaan Pembinaan KADER KB Ke Masyarakat	4992 Kegiat an	890.212.000	4992 Kegiata n	790.000.000		Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan
2	14	03	2	02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB					Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	4796 Unit	6.000.000	4796 Unit	15.000.000		Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB
2	14	03	2	02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	208 Orang	624.000.000	208 Orang	624.000.000		Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB
2	14	03	2	02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organi sasi	260.212.000	208 Orang	300.000.000		Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja (Hasil Program/ Keluaran Kegiatan/ Keluaran Subkegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
											Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5	6	7		9	10		11	12
2	14	03	2	03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					Terlaksananya Visitasi dan Registrasi Klinik KB	90 %	2.055.442.500	90 %	2.100.00.000		Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
2	14	03	2	03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	70 Lapora n	75.600.000	70 Lapora n	75.600.000		Subbagian Umum dan Kepegawaian
2	14	03	2	03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3600 Orang	1.835.794.000	3600 Orang	15.000.000		Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana
2	14	03	2	03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10 Lapora n	204.494.000	10 Lapora n	204.494.000		Seksi Jaminan Keluarga Berencana

Kode						Indikator Kinerja (Hasil Program/ Keluaran Kegiatan/ Keluaran Subkegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5		6	7
2	14	03	2	03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi						
						Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	87 Orang	25.000.000	87 Orang	30.000.000		Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana
2	14	03	2	03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria						
						Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	5 Orang	7.000.000	5 Orang	15.000.000		Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana
2	14	03	2	03	0013	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB						
						Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	50 Orang	12.271.300	50 Orang	15.000.000		Seksi Jaminan Keluarga Berencana

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja (Hasil Program/ Keluaran Kegiatan/ Keluaran Subkegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
											Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5	6	7		9	10		11	12
2	14	03	2	04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan POKJA Kampung KB, Lini Lapangan dan Tribina di Kampung KB	240 Kegiatan	827.249.900	240 Kegiatan	837.250.000		Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
2	14	03	2	04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2 Organisasi	19.999.900	2 Organisasi	30.000.000		Seksi Advokasi dan Penggerakan
2	14	03	2	04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB					Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	3.750.000	1 Dokumen	3.750.000		Seksi Jaminan Keluarga Berencana
2	14	03	2	04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	46 Kampung	803.500.000	46 Kampung	803.500.000		Seksi Jaminan Keluarga Berencana

Kode						Indikator Kinerja (Hasil Program/ Keluaran Kegiatan/ Keluaran Subkegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2025		Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1						7	8	9	10		11	12
2	14	04				Program Penguatan Peran PIK-Remaja Proyek Nasional dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	100 %	5.115.650.000	100 %	5.127.700.000		Kepala Dinas
						Persentase UPPKS yang mendapatkan pembinaan	100 %		100 %			
2	14	04	2	01		Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kampung KB	25 Kegiatan	363.800.000	25 Kegiatan	363.800.000		Kepala Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
2	14	04	2	01	001 6	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Jumlah Laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	6 Laporan / Dokumen	28.800.000	6 Laporan / Dokumen	28.800.000	Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Kode							Indikator Kinerja (Hasil Program/ Keluaran Kegiatan/ Keluaran Subkegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2025		Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
							Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1							7	8	9	10		11	12
2	14	04	2	01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)							Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
2	14	04	2	01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)							Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
2	14	04	2	02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							Kepala Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
							Pelaksanaan Pembinaan POKTAN BKB/BKR/BKL	1 Kegiatan	4.751.850.000	1 Kegiatan	4.751.850.000		

Kode						Indikator Kinerja (Hasil Program/ Keluaran Kegiatan/ Keluaran Subkegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2025		Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1						7	8	9	10		11	12
2	14	04	2	02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Organisasi	7.950.000	12 Organisasi	20.000.000		Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
2	14	04	2	02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						
						Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 Laporan	2.259.000.000	10 Laporan	2.259.000.000		Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja (Hasil Program/ Keluaran Kegiatan/ Keluaran Subkegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2025		Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
											Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
2	14	04	2	02	000 6	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 Lapora n	2.484.900.000	10 Lapora n	2.484.900.000		Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera



BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen Tahun 2025, yang disusun berdasarkan pada RPJMD 2021-2026 dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih serta target dan sasaran pembangunan yang dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Rencana Kerja ini dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen dalam menjalankan tugas dan fungsi serta acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2025. Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan dan rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok yang berguna untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada;



3. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama baik secara internal maupun eksternal (antar instansi) untuk koordinasi dan sinkronisasi yang dapat meningkatkan hubungan kerja sama yang sinergis;

Meningkatkan dan mengembangkan secara berkelanjutan kontribusi Dinas PPKB PPPA dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sragen, 07 Agustus 2024

KEPALA DINAS PPKBPPPA
KABUPATEN SRAGEN



dr. YOHANES AGUS SUDARMANTO, M.Kes.

NIP. 19700314 200501 1 009